

KONSTELASI NARASI TENTANG KETAHANAN PANGAN DALAM PROGRAM FOOD ESTATE DI EKS PLG KALIMANTAN TENGAH: DIMANAKAH NARASI PELADANG PEREMPUAN?

Oleh:

Evi Nurleni¹

¹Dosen Program Studi Sosiologi Universitas Palangka Raya
email: evinurleni@fisip.upr.ac.id

ABSTRAK:

Media memainkan peran dalam mengopinionkan, mempersepsikan dan mengorientasikan suatu isu kepada mayoritas atau khalayak. Sementara bentuk opini, persepsi dan orientasi dari media menjadi narasi-narasi yang terbentuk dalam konstelasi yang saling “bertarung”. Pertarungan narasi terbentuk sebagai upaya untuk merebut ruang publik yang dapat mempengaruhi persepsi dan kepentingan, bahkan kebijakan di aras negara. Narasi *food estate* di Kalimantan Tengah dalam hal ini, dipahami sebagai konstelasi atau pertarungan narasi untuk merebut ruang “kekuasaan” dan kepentingan. Program *food estate* dalam pertarungan diksi-diksi antara kepentingan pemerintah yang berkiblat pada modernisasi, pembangunan dan kemajuan, berhadapan dengan kepentingan masyarakat sipil yang berkiblat pada lingkungan hidup, kepentingan lokal dan masyarakat adat. Pertarungan diksi-diksi ini sebagai pertarungan narasi-narasi besar yang melupakan narasi-narasi kecil dan lokal yakni peladang perempuan. Peladang Dayak sendiri sejak lama dinarasikan sebagai kelompok yang merusak hutan, primitif dan tidak modern, sehingga tidak terdepan dalam mempercakapkan soal pembangunan. Sementara penderitaan perempuan peladang Dayak hilang dalam narasi besar atau menjadi kelompok yang dibisukan atau subaltern.

Kata Kunci: *Media, Narasi Besar, Perempuan Peladang Dayak, Subaltern*

ABSTRACT:

The media plays a role in opinion, perceiving and orienting an issue to the majority or audience. Meanwhile, the forms of opinion, perception and orientation from the media become narratives that are formed in a constellation that “fights” each other. Narrative battles are formed as an effort to seize public space that can influence perceptions and interests, even policies at the state level. In this case, the food estate narrative in Central Kalimantan is understood as a constellation or narrative battle to seize the space of “power” and interest. The food estate program is in a battle of dictions between the interests of the government which is oriented towards modernization, development and progress, against the interests of civil society which is oriented towards the environment, local interests and indigenous peoples. The battle of these dictions is a battle of grand-narratives that forgets small and local narratives, namely female cultivators. Dayak cultivators themselves have long been narrated as a group that destroys forests, primitive communities and the unmodern people, so they are not at the forefront of discussing

development issues. Meanwhile, the suffering of Dayak cultivators woman disappears in the grand narrative or becomes a silent group or subaltern.

Keywords: *Media, Grand Narrative, Dayak Cultivator Woman, Subaltern*

PENDAHULUAN

Proyek pembangunan lumbung pangan nasional atau biasa disebut *food estate* di Kalimantan Tengah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Proyek ini dicanangkan oleh pemerintah Indonesia tahun 2020 dalam kaitan dengan asumsi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB terkait dampak ekonomi paska pandemi covid-19. Tahun 2021 ini lahan untuk pertanian padi mulai dibuka sekitar 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas, dengan rencana lahan pada Blok E dan B pada eks PLG (*Proyek Food Estate Di Kalimantan Tengah, Untuk Siapa? : Mongabay.Co.Id*, n.d.). Dan lahan untuk perkebunan singkong dibuka 30.000 hektar di Kabupaten Gunung Mas (*Menhan Kunjungi Lokasi Food Estate Singkong Di Kalteng - Apahabar.Com*, n.d.). Respon masyarakat terhadap program food estate setidaknya terbentuk dalam opini-opini publik, baik melalui media (baik yang *mainstream* atau tidak) maupun diskusi publik yang intensif. Penulis mencatat sebagian perdebatan itu sebagai berikut.

Pertama, isu deforestasi terhadap hutan kawasan lindung dan kubah gambut di blok E kawasan eks PLG sebagai narasi traumatik kegagalan masa lalu. Misalnya sorotan terhadap PERMEN Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk *food estate* dikuatirkan akan merusak hutan lindung dan kawasan konservasi (*Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate Di Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah | WALHI*, n.d.). Menurut peneliti dan pengamat lingkungan, blok E eks PLG ini merupakan

kawasan hutan penyangga yang mempunyai tutupan dan hutan yang masih baik untuk mencegah kebakaran hutan, sehingga harus tetap dipertahankan eksistensinya. Dalam negosiasinya, pemerintah memberi jaminan bahwa blok E tidak akan dibuka untuk lahan *food estate* (*Pembangunan "Food Estate" Di Kalteng Tidak Akan Buka Eks Pengembangan Lahan Gambut Halaman All - Kompas.Com*, n.d.).

Perdebatan ini kemudian ditarik pada sisi traumatika terhadap kegagalan-kegagalan proyek di lahan eks PLG ini (*Food Estate, Mengulang Kegagalan PLG – Save Our Borneo*, n.d.). Setidaknya, pasca kegagalan proyek PLG satu juta hektar tahun 1995, sudah ada beberapa kebijakan pemerintah, seperti Kepres Nomor 88/1999 tentang rehabilitasi PLG era Presiden Megawati Soekarno Putri. Juga, Kepres 2/2017 tentang revitalisasi wilayah PLG masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang keberhasilannya sebagai lumbung pangan nasional tidak nyata (*Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa? : Mongabay.Co.Id*, n.d.). Masyarakat lokal justru menerima dampak lingkungan, seperti kebakaran hutan dan banjir (*Ketika Ambisi Food Estate Pemerintah Rugikan Petani Di Kalteng - Tirto.ID*, n.d.).

Kedua, isu intervensi pemerintah terhadap pola tanam petani lokal sebagai narasi modernitas. Misalnya sorotan tentang perubahan pola tanam tiga kali setahun dan mengganti bibit lokal dengan bibit unggul (*Anjuran Perubahan Pola Tanam Di Food Estate Membuat Hasil Panen Merosot - ANTARA News Kalimantan Tengah - Berita*

Terkini Kalimantan Tengah, n.d.). Menurut pengamat pangan, perubahan pola tanam membutuhkan bantuan teknik khusus, karena belum tentu petani langsung dapat menyesuaikan diri. Dalam kaitan ini potensi penolakan petani lokal terhadap intervensi pola tanam pemerintah menjadi sangat tinggi, sementara klaim pemerintah akan keberhasilan peningkatan produksi padi juga tinggi. Masyarakat lokal dinarasikan sebagai sebagai kelompok yang harus diubah pola kerja dan pola pertaniannya dengan mengandalkan korporasi. Selain itu, peningkatan terhadap produksi pangan menimbulkan intervensi baru yakni teknologi serta alat dan mesin pertanian baru (*Ubah Mindset Petani Di Food Estate Dengan Alsintan*, n.d.).

Perdebatan ini kemudian ditarik pada sisi peminggiran masyarakat lokal yang dapat mengancam kelola masyarakat atas tanah dan ruang hidup serta dampak ekonomi, seperti kehilangan ketrampilan hidup dan sumber mata pencaharian (*Ketika Ambisi Food Estate Pemerintah Rugikan Petani Di Kalteng - Tirto.ID*, n.d.). Selanjutnya, penanaman bibit unggul akan mengancam kelestarian bibit lokal, beserta varietas-varietas tanaman lokal lainnya. Narasi modernitas tidak hanya akan mengubah ruang hidup petani lokal, tetapi juga meminggirkan narasi lokal tentang kedaulatan dan kemandirian pangan (*Pelibatan Petani Dalam Proyek Food Estate Di Kalteng Tak Jelas : Mongabay.Co.Id*, n.d.). Petani lokal sebagai komunitas eks peladang akan menjadi a-historis, tercerabut dari pengetahuan lokal dan ritus-ritus.

Ketiga, isu partisipasi tenaga kerja atau petani lokal sebagai narasi “mesin produksi” kaum kapitalis. Jamak diakui bahwa petani lokal masih minim pemahaman soal perkebunan komersial yang mengacu pada pasar ekspor (*Food Estate Dan Pertahanan Negara, Dari Singkong Hingga Devisa*, n.d.). Sementara itu, pemerintah daerah tidak punya gagasan *sui generis*, karena narasi

food estate ini datang dari pusat. Food Estate sebagian besar akan dimiliki oleh korporasi dan hasil produksi menjadi sepenuhnya menjadi milik pasar (*Food Estate Kalteng Bakal Jadi “Surga” Singkong Di RI*, n.d.). Petani lokal akan teralienasi dari sumber-sumber produksi dan menjadi penonton “kemakmuran” dari hasil kerjanya sendiri. Atau menggunakan konsep Karl Marx, petani sebagai kelompok yang teralienasi; kelompok yang tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, padahal lahan yang digunakan itu adalah lahan milik mereka. Selanjutnya, marginalisasi dan alienasi menciptakan pemiskinan struktural dan kultural serta juga konflik (*Warga Minta Program Singkong “Food Estate” Jangan Rambah Kebun - Kompas.Id*, n.d.).

Menelisik tiga debat isu di atas, penulis melihat semacam pertarungan narasi (narasi dan *counter* narasi) dari berbagai kalangan terkait proyek *food estate*. Pemangku kebijakan menggunakan logika krisis pangan; bahwa proses mengadanya program ini logis, muncul dari keyakinan pemerintah akan efek dari pandemi covid-19 terhadap ketahanan pangan nasional dalam masa pandemi, dengan didukung analisis FOA. Jurnal Lemhanas misalnya menggunakan konsep *food security* atau pertahanan pangan. Konsep sekuritisasi didefinisikan sebagai proses suatu aktor memaknai isu sebagai isu keamanan, dimana peran tindakan, narasi, retorika, dan pernyataan aktor terkait dengan isu keamanan memiliki peran penting dalam sekuritisasi. Tujuan sekuritisasi adalah membentuk kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan yang kemungkinan dialaminya. Bahwa pandemi covid-19 memiliki efek ganda terhadap kehidupan masyarakat, termasuk ketahanan pangan nasional (Basundoro & Sulaeman, 2020).¹ Ini adalah salah satu contoh

¹ Untuk memperkuat analisis, dalam 2 perspektif teori yakni teori Neo-Malthusian dan kelangkaan pangan dan konsep sekuritisasi Mazhab Compenhagen dan keamanan internasional nonkonvensional. Teori Neo-Malthusian tentang ketahanan pangan mengatakan

narasi keberpihakan yang kuat terhadap konsep pembangunan dan modernitas yang dibingkai dalam konsep ketahanan pangan dan sekuritisasi pada negara (pemerintah). Sementara aspek, masyarakat dan lokalitas menjadi narasi yang dilupakan. Narasi besar tentang *food estate*, melupakan narasi petani dan perempuan petani yang berjuang melawan kelangkaan pangan, menjadi entitas yang terlupakan dan identitas yang terpinggirkan.

Lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati lingkungan bergerak untuk masyarakat adat dan berbasis lingkungan hidup, menggunakan logika kedaulatan (*food sovereignty*) dan kemandirian pangan sebagai konter naratif. Mereka memusatkan perhatian pada kemungkinan deforestasi hutan, perusakan lahan gambut dan peminggiran partisipasi masyarakat adat/petani lokal. Ini juga sekaligus konter narasi terhadap peladang Dayak sebagai “penyebab” kerusakan dan kebakaran, bukan “penyelamat” bagi lingkungannya. Sebab narasi seperti ini mempengaruhi tidak hanya konstelasi politik nasional bahkan internasional, padahal jamak dalam penelitian disebutkan bahwa institusi politik ekonomi-politik nasional dan internasional turut “bermain” dalam isu lingkungan. Ironisnya orang Dayak menjadi “tumbal” menjadi masyarakat yang terasing dan diasingkan dalam jerat “sistem dunia”. Narasi Dayak sebagai eksotis, bertelingan panjang, bar-bar dan primitif sulit diubah (Lahajir, 2001). Narasi tentang kedaulatan pangan adalah suatu pandangan strategis dan jalan kemerdekaan bagi petani untuk keluar dari himpitan neo-liberal yang diskriminatif (Bernstein & Bachriadi, 2014).

bahwa “kelangkaan sumber daya terbarukan dapat memicu konflik antar makhluk hidup, dari skala terkecil seperti tetangga komunitas kecil hingga skala masif seperti perang antar Negara”. Asumsinya, ketahanan pangan yang kuat adalah salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi krisis yang dapat terjadi akibat kelangkaan sumber daya.

KONSEPTUAL:

1. Masyarakat Baru dan Pertarungan Narasi

Masyarakat baru adalah istilah yang menandakan sebuah realitas masyarakat post-modern, dimana beragam narasi diekspresikan dan direkonstruksi melalui media, sehingga mengubah persepsi tentang narasi menjadi bentuk yang “dimediasi”. Dalam situasi ini, mediasi memainkan peran penting, bahkan krusial yang bisa saja mengambil alih peran institusi lain, seperti keluarga dan sekolah sebagai penyedia informasi dan orientasi moral bagi masyarakat. Dalam kondisi ini media berperan membentuk persepsi masyarakat, bahkan mengarahkan persepsi masyarakat pada kehendak narator (mayoritas). (Erol İşık, 2015)

Berdasarkan paparan di atas, penulis menilai bahwa terjadi pertarungan narasi melalui media terkait dengan program food estate di Kalimantan Tengah. Yang dimaksud ialah suatu bentuk “permainan” dalam penciptaan diksi-diksi untuk mempengaruhi persepsi, kepentingan dan kebijakan di aras negara. Bahkan narasi demokrasi dalam masyarakat baru akan dimenangkan oleh narasi yang dilegitimasi kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas terus memainkan narasi soal legalitas dan formalitas terhadap tidak hanya entitas bahkan identitas. Sehingga, membangun narasi yang dapat diterima kelas penguasa menjadi pilihan populer dalam kaitan memenangkan skema proyek dan pembiayaan (ekonomi) nasional maupun internasional. Narasi tidak lepas dari kepentingan. Dan penting dicatat, dalam pertarungan narasi di atas, entitas dan identitas perempuan peladang menjadi narasi yang terlupakan dan belum pernah dibicarakan.

Penulis mencoba memahami bagaimana program ketahanan pangan mengubah

ruang hidup, baik sosio-politik, ekonomi dan kultural masyarakat peladang, terutama perempuan peladang di Kalimantan Tengah. Kebanyakan studi tentang program pembangunan berbasis lingkungan hidup mengkaji dari aspek ekonomi-politik (Rowland, 2016) dan dalam keberpihakan yang kuat terhadap narasi besar tentang kemajuan, kemandirian ekonomi dan modernisasi. Bahwa orang lokal tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan ekonomi dan modernisasi pembangunan, hidup miskin dan resisten terhadap pembangunan. Narasi lokal atau “narasi kecil” tidak populer dan harus ditinggalkan. Narasi kecil masyarakat lokal yang memiliki kekuatan untuk memberi makna pada perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya dan sesuatu yang layak didengarkan. Kajian ini berusaha untuk menelusuri narasi-narasi lokal tentang kemajuan, kedaulatan pangan dan pembangunan(modernitas), dengan kerangka konsep gerakan sosial baru dan konsep kritik pada narasi besar. Narasi besar modernitas dalam pembangunan secara umum, dan proyek *food estate* secara khusus; berpotensi melupakan narasi petani/peladang dan perempuan petani/peladang yang berjuang melawan kelangkaan pangan di tanahnya sendiri. Kelompok yang menjadi saksi yang “dibisukan” dalam konstelasi kepentingan pangan nasional dan internasional.

2. Marginalisasi Masyarakat dan Narasi Lokal

Orang lokal menjadi komunitas yang terpinggirkan di kampungnya sendiri, terutama perempuan yang berkaitan langsung dengan kegiatan penyedia konsumsi di rumahnya. Misalnya ketika pembangunan kanal mega proyek PLG, maka air sungai yang biasa dikonsumsi oleh warga daerah aliran sungai berubah rasa dan kualitas airnya. Air menjadi sangat asam, akibat air dari lahan gambut yang dialiri ke sungai-

sungai yang dikonsumsi warga sehari-hari. Bagi para ibu dari keluarga kelas menengah, mereka beralih ke air kemasan yang relatif lebih bersih dan sehat, tetapi ibu dari keluarga miskin mereka tidak punya pilihan lain, selain mengkonsumsi air asam sungai tersebut.

Proses peminggiran dan pemiskinan laki-laki dan perempuan oleh pemerintah dan negara pada dasarnya sama, hanya terdapat perbedaan “penderitaan” yang dialami akibat perbedaan status dan fungsi gender dalam masyarakat. Akibat perbedaan status dan fungsi gender, acapkali kepentingan praktis dan strategis perempuan diabaikan dalam program pembangunan atau pelaksanaan proyek pembangunan. Karena secara tradisional, perempuan tidak memiliki hak untuk terlibat dalam urusan publik, atau terlibat dalam pembangunan. Sehingga, acapkali tidak disadari bahwa perempuan pun menerima dampak langsung dari kebijakan pemerintah atau program pembangunan, bahkan yang paling parah.

Sebagai contoh penetapan dan pembangunan Taman Nasional Sebangau ataupun Program REDD+ (Kapuas) yang pernah dilaksanakan di Kalimantan Tengah memiliki pengaruh yang signifikan pada kehidupan masyarakat lokal (Herminasari & Setiadi, 2018). Salah satunya berkurangnya sumber pangan masyarakat lokal karena klaim tanah bagi proyek nasional tersebut, serta berkurangnya sumber daya alam sebagai investasi bagi masyarakat lokal untuk kegiatan mencari nafkah keluarga. Masyarakat lokal menjadi termarginalisasi di kampungnya sendiri.

Dalam penelitian sebelumnya, terkait dengan pengembangan Taman Nasional Sebangau dan program penyangganya yaitu pengembangan Desa Wisata pada komunitas Dermaga Kelurahan Kereng Bangkirai. Penulis menamakan mereka sebagai komunitas yang digempur dari arah air dan

darat; menjadi komunitas yang “terjepit” dalam kepentingan pembangunan nasional. Rentan mendapat stereotip sebagai komunitas ilegal, yakni illegal fishing, illegal logging, maupun kumuh ilegal (Nurleni et al., 2019). Pemerintah membawa narasi besar dan memberangus semua narasi kecil hidup masyarakat, dan menggantinya dengan cerita ketidakmampuan masyarakat untuk bersaing.

Penulis menemukan bahwa terdapat dua karakteristik respon masyarakat terhadap proyek pembangunan, yakni resiliensi dan resistensi (Herminasari & Setiadi, 2018). Resiliensi terhadap program pembangunan memiliki dua sisi, yaitu mereka mendayagunakan sumber daya alam yang “tersisa” dan mereka yang beradaptasi dengan tujuan proyek atau pembangunan, walaupun inti batin masyarakat tetap menyimpan “nostalgia rindu” kampung halaman sebelum program pembangunan (*Food Estate, Sebuah Tantangan Dan Harapan Baru Gambut Kalteng - KARANTINA PALANGKARAYA*, n.d.). Resistensi terhadap program pembangunan juga memiliki dua sisi, yakni mereka yang melakukan gerakan masyarakat sipil bersama organisasi masyarakat dan mereka yang menjadi komunitas yang apatis dan partisipasi semu (*Legislator PKS: Food Estate Antara Harapan Dan Kenyataan | Fraksi PKS*, n.d.). Respon seperti ini tidak lepas dari padangan sosia-ekonomi lokal masyarakat lokal dalam merespon pembangunan atau perubahan disekitarnya (Dove, 1996). Secara tematik tulisan ini mencoba mengusung tema tentang konsep kemandirian dan kedaulatan pangan perempuan peladang dayak dalam arus narasi besar program ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Dalam kaitan ini secara keilmuan, studi ini berkontribusi bagi masyarakat lokal dalam konteks program-program ini. Untuk memahami realitas resistensi dan resiliensi

masyarakat dan juga perempuan peladang dalam hal ini, dapat dipahami fakta sosial dalam masyarakat yang solusinya tidak selalu konflik sosial. Bahwa dengan melibatkan kontribusi masyarakat lokal sebesar-besarnya menjadikan Indonesia menjadi masyarakat agraris yang menghargai kearifan lokal bangsanya sendiri. Masyarakat agraris yang dikembangkan bukan hanya untuk memenuhi komoditas internasional saja, tetapi yang terutama untuk “mengenyangkan” penduduk lokal. Penduduk lokal yang sehat dan cukup gizi, akan menjadikan memiliki SDM unggul, yang siap berkompetisi dengan arus global. Bahwa tujuan mulia pengembangan sumber pangan nasional betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat lokal terutama dan masyarakat Indonesia secara umum.

Berdasarkan asumsi keterpinggiran perempuan peladang dan masyarakat lokal dalam narasi besar pembangunan dan modernisasi, serta geopolitik yang mengubah ruang hidup mereka secara budaya dan sosial. Bahwa mereka sebenarnya menyimpan narasi-narasi lokal yang mereka gunakan sebagai “energi” untuk bertahan hidup (resistensi) dan mengumpul daya (resistensi) untuk merespon perubahan geopolitik dalam ruang hidup mereka.

PEMBAHASAN:

Menarasikan Perempuan Peladang sebagai Narasi Kelas Pekerja

Konstruksi gender masyarakat yang bias, tidak menempatkan perempuan yang bekerja di sektor swasta dalam status bekerja. Dalam data statistik di Desa atau Kelurahan misalnya, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai peladang atau pedagang keliling dicatat sebagai ibu rumah tangga, yang sama artinya tidak bekerja. Sehingga dengan menyebut perempuan peladang dalam tulisan ini, sebagai sebuah upaya merekonstruksi identitas produktif perempuan. Sekaligus juga

untuk menafsirkan data statistik di atas dalam perspektif feminis sosialis. Bahwa perempuan yang pada kenyataan “turut serta” mencari nafkah keluarga pada sektor swasta layak disebut sebagai penghasil utama keluarga juga. Dekonstruksi gender seperti ini berupaya untuk meletakkan perempuan dalam sebuah narasi politik identitas dan gerakan kesetaraan.

Dalam konteks sebuah gerakan sosial, politik identitas dan feminisme mengandung sisi resistensi terhadap konstruksi sosial yang mapan. Cenderung mempertanyakan tatanan sosial-budaya yang ada karena telah membentuk hegemoni dalam relasi kuasa yang tidak setara. Misalnya, ideologi patriarki dikritik sebagai “sistem dunia” yang membentuk relasi kuasa gender yang timpang. Dan “perkawinannya dengan kapitalisme” membentuk subordinasi perempuan yang semakin paradoks dan diskriminatif. Secara administrasi, ia disebut bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi secara ekonomi termasuk kategori tidak produktif karena kerja tidak dibayar. Secara budaya, melanggar kodrat saat menghasilkan uang, tetapi secara politik “ditarik” keluar untuk berpartisipasi. Perempuan dalam paradoks; terjebak dalam *triple roles* (Handayani, 2008)². Kritik terhadap penindasan patriarki dan kapitalisme merupakan ciri khas dari feminis sosialis.

Perempuan dalam narasi (“Handbook of Narratology /Narratologia Contributions to Narrative Theory Edited,” 2014) pembangunan³ menjadi kelompok yang jarang dilibatkan, berkaitan dengan hambatan budaya patriarki. Kelompok ini baru akan disebutkan

2 *Triple Role* adalah istilah yang digunakan oleh Moser untuk menggambarkan perempuan dalam 3 peran, yakni produktif (menghasilkan uang), reproduktif (mengurus rumah, anak, dll) dan komunitas (keterlibatan sosial perempuan dalam Lembaga sosial lainnya, seperti agama, LSM, dll).

3 Narasi adalah pewayangan, cerita atau kisah keseharian yang mempengaruhi perilaku sosial, tindakan sosial bahkan kebijakan di tingkat negara yang diopinionkan oleh individu-ahli-pemangku kepentingan, komunitas atau organisasi resmi atau tidak resmi yang berakhir menjadi fenomena sosial.

perannya jika “dipaksa” aturan. Misalnya dalam politik legislasi “dipaksa” oleh kebijakan *affirmative action*. Oleh sebab itu, tidak bisa tidak, akhirnya gerakan perempuan harus membangun narasi-narasi tandingan yang dekonstruktif melalui narasi kecil yang disebut dengan pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dalam budaya patriarki adalah pengetahuan feminisme yang membentuk kesadaran sebagai *the other* dan atau kelompok minoritas.

Dalam pengalaman perempuan peladang Dayak, narasi-narasi kecil bermunculan bukan untuk tujuan resistensi, tetapi juga sebagai sebuah upaya resiliensi atau bentuk adaptasi terhadap situasi yang baru. Misalnya, tahun 2019 di Kalimantan Tengah berlaku Perda No.5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam pasal 2 ayat 1 yang mengatur larangan membakar hutan dan atau lahan (*Perda 5 Tahun 2003.PDF*, n.d.). Penulis menemukan bahwa praktek membakar ladang masih dilakukan oleh peladang perempuan, dengan alasan jika ingin menanam harus bakar. Dalam narasi kecil yang disebut pengalaman perempuan peladang, mereka berkali-kali gagal tanam dan panen akibat lahan tidak subur. Jika ladang gagal pemerintah tidak kasih makan, maka cari akal untuk “bermain kucing-kucingan”. Atau dalam narasi kecil pengalaman perempuan pedagang tahun 2020, selama aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tetap berjualan tanpa menggunakan masker. Pemerintah tahunya melarang, kami lebih baik mati karena corona daripada mati kelaparan di rumah sendiri (Nurleni, 2021).

Narasi kecil perempuan peladang dan pedagang yang dicontohkan di atas, dalam konteks narasi besar pembangunan dan “penertiban” adalah sebuah resistensi atau perlawanan. Namun jika dibaca secara kritis, maka narasi kecil ini merupakan sebuah resiliensi dalam pegulatan ekonomi yang rumit, yang tidak terpenuhi dalam beberapa skenario pembangunan atau kebijakan negara.

Dalam konteks ini, maka tulisan ini mencoba untuk memahami narasi-narasi kecil ini, sebagai sebuah upaya mendekonstruksi narasi besar pembangunan tentang kesejahteraan, kemapanan dan modernitas. Hidup perempuan peladang dan pedagang di atas adalah pergulatan memenuhi kebutuhan hidup, bukan tentang keberdayaan ekonomi. Sebuah pergulatan sosial untuk mengatasi kelangkaan pasokan makanan dalam rumahnya, sehingga pilihan yang tersisa: makan atau tidak, karena berpuasa sudah jadi praktek sehari-hari. Sementara akses dan kontrol terhadap ide narasi besar tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan tidak tersedia dan kemampuan mempertahankan modal juga belum dimiliki.

Feminisme mengembangkan sistem ide tentang kehidupan manusia yang mencirikan perempuan sebagai obyek dan subyek pengetahuan. Pengetahuan feminisme membentuk yang disebut dengan perspektif feminisme yang mendorong penteorian sosiologi feminis. Feminis sosialis memahami bahwa pengalaman kaum perempuan mengenai perbedaan gender, ketidaksetaraan gender dan penindasan gender (struktural), bervariasi menurut lokasinya dalam kapitalisme, patriarki dan rasisme. Pengetahuan feminisme sosialisme menggunakan materialisme historis sebagai metode analisisnya.

Feminisme sosialis berfokus pada teori penindasan struktural, bahwa beberapa kelompok orang memperoleh keuntungan langsung dari pengendalian, pemanfaatan dan penundukkan kelompok yang lainnya. Struktur patriarki, kapitalisme dan rasisme menghasilkan dominasi struktural dan pengalaman-pengalaman penindasan kelompok perempuan. Teori penindasan kelas perempuan, menerima analisis marxis dalam *The Origin Family, Private Property and the State* yang ditulis oleh Friedrich Engels (1884) yang konsisten dengan gerakan revolusi kelas sosial (Ritzer, 2018).

Feminis sosialis menerima bahwa relasi kelas berdasarkan sistem ekonomi kepemilikan dalam konsep harta benda dan ide kepemilikan laki-laki dalam keluarga menyebabkan kekalahan historis kelas jenis kelamin perempuan. Klaim kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi menghasilkan kelompok lain yang melaksanakan produksi yang disebut dengan pekerja atau pelayan. Dalam sistem keluarga (*familia*), perempuan-isteri-anak perempuan menjadi pelayan yang tunduk dan tidak dibayar, untuk terus meningkatkan nilai surplus, gaya hidup dan kekuasaan pemilik modal (kapitalis).

Dalam sistem ini, yang dominan berhasil membuat yang subordinat menjadi alat kehendak pihak dominan yang menolak subyektifitas dan kebebasan pihak subordinat. Struktur sosial yang dikendalikan oleh pihak dominan dengan ideologi dan kekuasaan, menyebabkan para subordinat tidak kelihatan dan kurang bernilai. Sehingga perempuan sebagai para subordinat menjadi yang terpinggirkan, tidak terlihat dan tidak terdengar. Narasi “pembisuan” ini akan semakin terlihat jelas dalam konteks pembangunan.

Perspektif perempuan dan pembangunan telah melalui fase yang cukup panjang. Perspektif pembangunan perempuan yang dikembangkan sejak tahun 70an oleh Ester Boserup yang menjelaskan kesenjangan gender yang terjadi dalam distribusi kerja, sumber daya dan manfaat, dimana dalam strategi pembangunan kebanyakan perempuan ditinggalkan. Dalam kerangka konseptual WID dan GAD, keduanya berkonsentrasi pada pertanyaan marginisasi perempuan dalam pembangunan (Sharma, 2000). Namun, kedua perspektif memiliki keterbatasan sebagai sebuah strategi karena terlalu “ekonomi”. Kemudian, konsep *women empowerment* diajukan menjadi model mengatasi marginalisasi perempuan dan pembangunan. Misalnya oleh Caroline Moser (1989) dan Sara Longwe (1991), yang menempatkan

5 level dalam kesetaraan perempuan yakni kontrol, partisipasi, penyadaran, akses dan kesejahteraan (material). Kerangka analisis ini adalah penyadaran yang berimplikasi pada kesadaran kritis terhadap dominasi, eksploitasi dan penindasan.

3. Perempuan dan Penyadaran Sosial

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, penyadaran memiliki 3 aspek yakni penyadaran generasi perempuan tentang kesenjangan gender dalam hal kesejahteraan materi, penyadaran bahwa kesenjangan gender bukan *God-given* atau sesuatu yang bersifat alami tetapi diciptakan dan mengorganisasi dan menggerakkan perempuan menuju kesetaraan gender. Dalam pelaksanaannya, pendekatan pemberdayaan perempuan dalam 2 tipe yakni "*sponsored*" (oleh pemerintah-top down) dan "*selfstriven*" (oleh perempuan-dari bawah ke atas), yang dilihat bertentangan. Moser misalnya mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah pemberdayaan yang diorganisasi dan dimobilisasi oleh perempuan sendiri sebagai gerakan perempuan. Kondisi ini yang kemudian disebutkan oleh Sharma, berujung pada kondisi antagonisme.⁴

4 Ibid. Secara kritis Sharma melihat terdapat 3 kelemahan dalam persepektif pemberdayaan perempuan, yakni dalam persepektif liberal, struktural dan kultural, yang berujung pada kondisi antagonism. Pertama, persepektif liberal memiliki 3 kelemahan, yakni bias eksklusif, orientasi adversarial dan logika subversif yang mereduksi relasi kemitraan laki-laki dan perempuan baik dalam lingkup domestik dan publik. Bahwa urusan pemberdayaan perempuan adalah hanya urusan perempuan. Kedua, persepektif struktural secara instriktik bersifat psikologis, a-struktural dan elitis, terutama dalam membaca skema pemberdayaan Kerangka Pemberdayaan Harvard. Persepektif struktural memiliki masalah dalam memahami level pemberdayaan, kelompok perempuan mana yang urgen diberdayakan dan pemberdayaan ekonomi dulu atau politik dulu. Terdapat polarisasi dalam memahami pemberdayaan dalam semua kelas sosial perempuan. Ketiga, dalam persepektif kultural, persepektif pemberdayaan perempuan mengandung bias *west ethnocentrism*. Ternyata, relasi gender memiliki variasi dalam semua kultur yang tidak bersifat universal, dalam hal ini dicontohkan dalam kultur masyarakat India dan Indian. Salah satunya, bahwa penyederhanaan terhadap penyebab kesenjangan gender pada katup kapitalisme dan patriarki tidak dapat memotret raelitas

Sharma mengajukan reformulasi terhadap pendekatan pemberdayaan dengan pertanyaan "mengapa pemberdayaan perempuan bukan pemberdayaan gender?" Bahwa masalah perempuan tidak dapat ditangani secara terpisah dari kerangka hubungan gender yang luas. Wawasan seperti itu sebenarnya ditawarkan oleh Caroline Moser (1989) dan Sara Longwe (1991), tetapi kemudian hilang atau kurang populer. Inilah saatnya untuk mengambil kembali wawasan itu dan dengan demikian membingkai ulang masalah dalam kaitannya dengan pemberdayaan gender. Bahwa pemberdayaan gender adalah akta ketidakseimbangan dalam hubungan gender dan menekankan perlunya memulihkan keseimbangan.

Ini menandakan transformasi relasi gender dari tataran hierarkis ke egaliter, ketimbang sekedar mengutak-atik posisi kekuasaan perempuan. Ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan gender dalam kerangka kerja yang saling melengkapi daripada dalam kerangka konflikual. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan gender, pemberdayaan multi-dimensi memiliki harapan yang lebih besar. Dimensi pemberdayaan seperti sosial, ekonomi dan psikologis, politik. Dalam arti yang lebih luas, pemberdayaan mengacu pada peningkatan kapasitas, baik ekonomi, psikologis dan, tentu saja, politik.

Pemberdayaan gender adalah gerakan sosial yang harus terencana. Juga terdapat kebutuhan untuk mendekonstruksi patriarki, dan kemudian merekonstruksi gerakan sosial pemberdayaan gender ini karena lebih bersifat politis-ekonomis dan kultural. Ini menyiratkan bahwa pemberdayaan gender harus mengelaborasi kekuatan masyarakat dan negara secara bersama-sama dan juga mengelaborasi kekuatan perempuan dan laki-laki dalam perjuangan yang sama. Pemberdayaan gender bertujuan untuk meningkatkan kepekaan gender tidak hanya pada perempuan tetapi juga

relasi gender dalam masyarakat India.

laki-laki yang cenderung bias dalam konstruksi. Sudah waktunya bagi laki-laki dan perempuan untuk melampaui identitas gender mereka dan bekerja sama untuk mengubah struktur hubungan gender dari hierarkis menjadi egaliter.

PENUTUP:

Media memainkan peran dalam mengopinikan, mempersepsikan dan mengorientasikan suatu isu kepada mayoritas atau khalayak. Sementara bentuk opini, persepsi dan orientasi dari media menjadi narasi-narasi yang terbentuk dalam konstelasi yang saling “bertarung”. Pertarungan narasi terbentuk sebagai upaya untuk merebut ruang publik yang dapat mempengaruhi persepsi dan kepentingan, bahkan kebijakan di aras negara. Narasi *food estate* di Kalimantan Tengah dalam hal ini, dipahami sebagai konstelasi atau pertarungan narasi untuk merebut ruang “kekuasaan” dan kepentingan. Program *food estate* dalam pertarungan diksi-diksi antara kepentingan pemerintah yang berkiblat pada modernisasi, pembangunan dan kemajuan, berhadapan dengan kepentingan masyarakat sipil yang berkiblat pada lingkungan hidup, kepentingan lokal dan masyarakat adat. Pertarungan diksi-diksi ini sebagai pertarungan narasi-narasi besar yang melupakan narasi-narasi kecil dan lokal yakni peladang perempuan. Peladang Dayak sendiri sejak lama dinarasikan sebagai kelompok yang merusak hutan, primitif dan tidak modern, sehingga tidak terdepan dalam mempercakapkan soal pembangunan. Sementara penderitaan perempuan peladang Dayak hilang dalam narasi besar atau menjadi kelompok yang dibisukan atau subaltern. Sehingga melakukan usaha reformulasi perempuan sebagai kelas pekerja merupakan sebuah upaya penyadaran perempuan sebagai *the second sex*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjuran perubahan pola tanam di Food Estate membuat hasil panen merosot - ANTARA News Kalimantan Tengah - Berita Terkini Kalimantan Tengah.* (n.d.). Retrieved April 8, 2021, from <https://kalteng.antaranews.com/berita/453030/anjuran-perubahan-pola-tanam-di-food-estate-membuat-hasil-panen-merosot>
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 8(2), 28–42.
- Bernstein, H., & Bachriadi, D. (2014). Tantangan Kedaulatan Pangan. In *Kompas*.
- Dove, M. R. (1996). Rice-Eating Rubber and People-Eating Governments: Peasant versus State Critiques of Rubber Development in Colonial Borneo. *Ethnohistory*, 43(1), 33–63. <https://doi.org/10.2307/483343>
- Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa? : Mongabay.co.id.* (n.d.). Retrieved April 8, 2021, from <https://www.mongabay.co.id/2014/09/08/eks-plg-proyek-sejuta-hektar-sisakan-sejuta-masalah-mengapa/>
- Erol Işık, N. (2015). the Role of Narrative Methods in Sociology: Stories As a Powerful Tool To Understand Individual and Society. *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, 18(1). <https://doi.org/10.18490/sad.47604>
- Food Estate, Mengulang Kegagalan PLG – Save Our Borneo.* (n.d.). Retrieved April 8, 2021, from <https://saveourborneo.org/food-estate-mengulang-kegagalan-plg/>
- Food Estate, Sebuah Tantangan dan Harapan Baru Gambut Kalteng - KARANTINA PALANGKARAYA.* (n.d.). Retrieved June 19, 2021, from <https://bkppky.org/2020/07/13/food-estate-sebuah-tantangan-dan-harapan-baru-gambut-kalteng/>
- Food Estate dan Pertahanan Negara, dari*

- Singkong hingga Devisa*. (n.d.). Retrieved June 8, 2021, from <https://www.jawapos.com/nasional/26/09/2020/food-estate-dan-pertahanan-negara-dari-singkong-hingga-devisa/>
- Food Estate Kalteng Bakal Jadi “Surga” Singkong di RI*. (n.d.). Retrieved June 8, 2021, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200710181730-4-171820/food-estate-kalteng-bakal-jadi-surga-singkong-di-ri>
- Handayani, T. and S. (2008). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. UUM Press.
- Handbook of narratology /Narratologia Contributions to Narrative Theory Edited. (2014). In J. Peter Hühn, Pier, John Schmid, Wolf, Schönert (Ed.), *Handbook of Narratology*. Walter de Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110316469>
- Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate di Lahan Gambut di Kalimantan Tengah | WALHI*. (n.d.). Retrieved April 8, 2021, from <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah>
- Herminasari, N., & Setiadi. (2018). *Strategi Perempuan Dayak Ngaju Dalam Program REDD + di Kalimantan Tengah (The Strategy of the Dayak Ngaju Women in the REDD+ Program in Central Kalimantan)*. XIX, 1–21.
- Ketika Ambisi Food Estate Pemerintah Rugikan Petani di Kalteng - Tirto.ID*. (n.d.). Retrieved April 8, 2021, from <https://tirto.id/ketika-ambisi-food-estate-pemerintah-rugikan-petani-di-kalteng-f9YF>
- Lahajir. (2001). *Etnoekologi Peladang Orang Dayak-Tunjung Linggang (Etnografi Lingkungan di Dataran Tinggi Tunjung)*. Yayasan Galang.
- Legislator PKS: Food Estate Antara Harapan dan Kenyataan | Fraksi PKS*. (n.d.). Retrieved June 19, 2021, from <https://fraksi.pks.id/2021/03/23/legislator-pks-food-estate-antara-harapan-dan-kenyataan/>
- Menhan Kunjungi Lokasi Food Estate Singkong di Kalteng - apahabar.com*. (n.d.). Retrieved June 8, 2021, from <https://apahabar.com/2021/03/menhan-kunjungi-lokasi-food-estate-singkong-di-kalteng/>
- Nurleni, E. (2021). LEBIH BAIK SAYA MATI OLEH CORONA DARIPADA MATI KELAPARAN (Sebuah Refleksi dari Tindakan Rasional dan Kapasitas Resiliensi Perempuan Pedagang Rombong Selama Pandemi Covid-19). *Jurnal Sophia*, 1(1).
- Nurleni, Evi Oktora, M., Lapalu, Ester Sonya Ulfarita, & Merilyn. (2019). Perempuan Berjuang Mengatasi Kelangkaan Pangan (Studi Jender Terhadap Dampak Kebijakan Pembangunan Pada Masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai). *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.594>
- Pelibatan Petani dalam Proyek Food Estate di Kalteng Tak Jelas : Mongabay.co.id*. (n.d.). Retrieved April 8, 2021, from <https://www.mongabay.co.id/2020/09/24/pelibatan-petani-dalam-proyek-food-estate-di-kalteng-tak-jelas/>
- Pembangunan “Food Estate” di Kalteng Tidak akan Buka Eks Pengembangan Lahan Gambut Halaman all - Kompas.com*. (n.d.). Retrieved April 8, 2021, from <https://money.kompas.com/read/2020/07/09/210000426/pembangunan-food-estate-di-kalteng-tidak-akan-buka-eks-pengembangan-lahan?page=all>
- Perda 5 tahun 2003.PDF*. (n.d.).
- Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah, untuk Siapa? : Mongabay.co.id*. (n.d.). Retrieved April 7, 2021, from <https://www.mongabay.co.id/2020/12/07/proyek-food-estate-di-kalimantan-tengah-untuk-siapa/>
- Ritzer, G. (2018). *Sociological Theory. In Social theory for beginners*. Sage

- Publishing.
- Rowland, L. L. and D. (2016). *Drivers and effects of agrarian change in Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan, Indonesia*. 4(4).
- Sharma, S. L. (2000). *Empowerment without Antagonism : A Case for Reformulation of Women ' s Empowerment Approach* Author (s): S. L. Sharma Published by : Sage Publications , Inc . Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/23619887> *A Case for Reformulation of Women ' s Empo.* 49(1), 19–39.
- Ubah Mindset Petani di Food Estate dengan Alsintan.* (n.d.). Retrieved April 8, 2021, from <https://ekbis.sindonews.com/read/190184/34/ubah-mindset-petani-di-food-estate-dengan-alsintan-1602151809>
- Warga Minta Program Singkong "Food Estate" Jangan Rambah Kebun - Kompas.id.* (n.d.). Retrieved June 8, 2021, from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/23/warga-minta-program-singkong-food-estate-jangan-rambah-kebun/>